

**KEDUDUKAN PRANATA HAK ATAS TANAH ADAT DALAM  
SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:  
ORIZA ALVIAN ANANTYA  
C100140137**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KEDUDUKAN PRANATA HAK ATAS TANAH ADAT DALAM SISTEM  
HUKUM AGRARIA NASIONAL**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**ORIZA ALVIAN ANANTYA**

**C100140137**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



**(Dr. Shalman Al Farizi, S.H., S.E., M.Kn)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEDUDUKAN PRANATA HAK ATAS TANAH ADAT DALAM SISTEM  
HUKUM AGRARIA NASIONAL**

**OLEH**

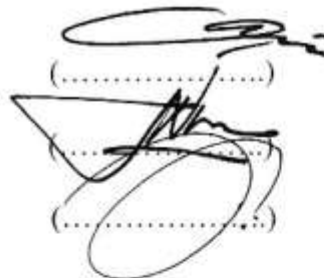
**ORIZA ALVIAN ANANTYA**

**C100140137**

Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Rabu, 7 Agustus 2019  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Dewan Penguji:**

1. Dr. Shallman, S.H., SE., M.Kn  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Nuria Siwi Enggarani, S.H., M.H  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, SH.MH  
(Anggota II Dewan Penguji)



**Dekan,**



  
(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati S.H., M.H.)  
NIK. 537/NIDN.0727085803

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 07 Agustus 2019

Penulis



**ORIZA ALVIAN ANANTYA**  
**C100140137**

## **KEDUDUKAN PRANATA HAK ATAS TANAH ADAT DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL**

### **Abstrak**

Dalam kehidupan masyarakat hukum adat, tanah dipahami sebagai suatu kesatuan secara turun-temurun dihuni, dikuasai dan dikelola masyarakat adat baik sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan maupun sebagai penanda atas identitas. Identitas inilah yang nantinya dapat menjadi salah satu sumber dalam mengetahui diakui atau tidaknya kedudukan pranata hak atas tanah adat bagi masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan sistem hukum agraria. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pranata mengenai hak penguasaan atas tanah dalam hukum adat di Indonesia, mengetahui sistem hukum agraria nasional menjamin kedudukan pranata hak atas tanah adat. Metode penelitian menggunakan metode Pendekatan Normatif yang berjenis Deskriptif, sumber data bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kesatuan masyarakat adat dengan hak tradisionalnya yang masih hidup diakui eksistensinya. Hak ulayat keberadaannya dalam UUPA adalah sudah diakui, akan tetapi pengakuan tersebut masih diikuti oleh syarat-syarat tertentu.

**Kata kunci:** hukum adat, hak atas tanah, sistem hukum

### **Abstract**

In the life of indigenous peoples, land is understood as a hereditary unit inhabited, controlled and managed by indigenous peoples both as a buffer for sources of livelihood and as a marker of identity. It is this identity that can later become one of the sources in recognizing whether or not the position of customary land rights is recognized for customary law communities in relation to the agrarian legal system. This study aims to find out the institution of land tenure rights in customary law in Indonesia, knowing that the national agrarian legal system guarantees the position of customary land rights. The research method uses the Normative Approach method that is of type descriptive, primary legal material data sources and secondary legal materials, data collection techniques used through library studies, using qualitative data analysis. The results of the study show that indigenous peoples' unity with their traditional rights that are still alive are recognized by their existence. The customary rights of existence in the UUPA are already recognized, but the recognition is still followed by certain conditions.

**Keywords:** customary law, land rights, legal system

### **1. PENDAHULUAN**

Tanah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanah merupakan salah satu hak milik yang sangat berharga bagi umat manusia,

demikian pula bangsa Indonesia, konsep yang ideal menggambarkan hubungan manusia dengan tanah, manusia dengan sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa telah menjadi landasan filosofis kehidupan manusia untuk hidup di bumi. Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari tanah karena merupakan satu sumber kehidupan dalam tatanan kehidupan sejak zaman tradisional sampai zaman modern.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memberikan landasan hukum bahwa masyarakat hukum adat dapat melakukan pengelolaan terhadap sumber daya hutan maupun sumber daya alam lainnya yang berada di wilayah adat. Hal itu dapat dilihat di Pasal 2 ayat 4 UUPA yang menyatakan:

*“Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”*

Ketentuan ini dapat dipahami bahwa hak masyarakat hukum adat terhadap sumberdaya hutan maupun sumber daya alam lainnya yang berada di wilayah adat adalah hak yang bersumber dari pendelegasian hak menguasai negara. Pemberlakuan Pasal 2 ayat 4 ini juga memberikan persyaratan bagi masyarakat hukum adat dan dalam hal ini negara dapat menghilangkan hak-hak masyarakat hukum adat.

Konflik sebagai akibat adanya pemindahan hak atas tanah dapat terjadi terhadap tanah-tanah yang awalnya dikuasai menurut hukum adat dan kemudian dikonversi menurut UUPA.<sup>2</sup> Tentang pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat, UUPA tidak memberikan kriterianya. Boedi Harsono menyebutkan alasan para perancang dan pembentuk UUPA untuk tidak mengatur tentang hak ulayat adalah karena pengaturan hak ulayat, baik dalam penentuan kriteria eksistensi maupun pendaftarannya, akan melestarikan keberadaan hak ulayat, sedangkan secara

---

<sup>1</sup> Muslim Andi Yusuf, *Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dan Sumberdaya Alam*, Prosiding Seminar Nasional Volume 02, Nomor 1, Hlm. 675.

<sup>2</sup> I Made Suwitra, *“Dampak Konversi dalam UUPA terhadap Status Tanah Adat”*, Jurnal Hukum, Vol. 17 No.1, Januari 2010, Hlm.116.

alamiah terdapat kecenderungan hak ulayat melemah.<sup>3</sup> Masalah tanah adalah masalah yang sangat menyentuh keadilan karena sifat tanah yang langka dan terbatas, dan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, tidak selalu mudah untuk merancang suatu kebijakan pertanahan yang menciptakan keadilan bagi semua pihak. Suatu kebijakan yang memberikan kelonggaran yang lebih besar kepada sebagian kecil masyarakat dapat dibenarkan apabila diimbangi dengan kebijakan serupa yang ditujukan kepada kelompok lain yang lebih besar.<sup>4</sup>

Pada tahun 2003 pemerintah menerbitkan SK menteri kehutanan nomor 175/2003 tentang perluasan taman nasional dari 40.000 ha menjadi 113.357 ha dan dinamakan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kebijakan ini mengangkat kembali konflik tenurial antara masyarakat kasepuhan dengan pemerintah. Pemerintah berkeyakinan bahwa status tanah-tanah tersebut merupakan kawasan hutan negara dan telah dikuasai serta diselesaikan penataan batasnya sejak 1923. Di sisi lain, masyarakat adat mengaku bahwa mereka telah menggarap tanah-tanah tersebut sejak turun temurun dimulai pada tahun 1910 sebagai tanah-tanah huma. Oleh karena itu, sejarah diharapkan dapat membantu menjelaskan dan memahami terjadi konflik tenurial tersebut di Lebak, Banten.<sup>5</sup>

Berbagai kasus terdesaknya hak masyarakat adat seiring dengan derasnya investasi maupun proyek pembangunan pemerintah semenjak tahun 1970-an telah mendorong pemikiran untuk menentukan suatu kriteria obyektif tentang keberadaan hak ulayat berkenaan dengan subyek, obyek dan kewenangannya. Pada akhir tahun 1999, Menteri Agraria/ Kepala BPN menerbitkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Dalam permen tersebut disebutkan antara lain keberadaan hak ulayat berkenaan dengan

---

<sup>3</sup> Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Pelaksananya*, Jakarta; Djembatan, Hlm. 64.

<sup>4</sup> Maria SW Sumardjono, 2007, *Kebijakan Pertanahan Anatar Regulasi Dan Implementasi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, Hlm. 19.

<sup>5</sup> Kurnia Warman Dkk, *Studi Tentang Kebijakan Penguatan Tenurial Masyarakat Dalam Penguasaan Hutan*, Bogor: Social Forestry Specialist, World Agroforestry Centre Southeast Asia Regional.

subyek, obyek dan kewenangannya.<sup>6</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri tersebut menyebutkan tentang kriteria penentu keberadaan hak ulayat yang terdiri dari tiga unsur, yakni: adanya masyarakat hukum adat tertentu, adanya hak ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat itu, dan adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana pranata mengenai hak penguasaan atas tanah dalam hukum adat di Indonesia? *Kedua*, Apakah sistem hukum agraria nasional menjamin kedudukan pranata hak atas tanah adat?

## **2. METODE**

Metode yang digunakan penulis adalah Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif karena dalam penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian deskriptif untuk menggambarkan secara jelas, mengenai berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu mendeskripsikan mengenai hak penguasaan atas tanah dalam hukum adat di Indonesia. Sumber data yang diperoleh dari penulis adalah sumber data bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Pranata Mengenai Hak Penguasaan Atas Tanah Dalam Hukum Adat Di Indonesia**

Masyarakat adat dapat dibentuk berdasarkan ikatan darah (*geneologis*) atau berdasarkan ikatan daerah (*territorial*). Masyarakat adat *geneologis* adalah yang terdiri dari penduduk yang merasa terikat semata-mata karena keturunan dari

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.



nenek moyang yang sama, sedangkan masyarakat adat yang bersifat *territorial* adalah masyarakat adat yang anggota-anggotanya merasa terikat kepada daerah tempat kediamannya yang tertentu. Perlindungan hak asasi masyarakat adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”* Hak masyarakat adat juga dilindungi dalam Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan *“identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”*

Berdasarkan Pasal tersebut terlihat bahwa kesatuan masyarakat adat dengan hak tradisionalnya yang masih hidup diakui eksistensinya. Sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, maka TAP XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan perlindungan yang layak bagi eksistensi hak-hak masyarakat adat termasuk hak ulayatnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 tentang hak untuk mempertahankan kehidupan, Pasal 6 tentang hak untuk memperjuangkan hak-haknya secara kolektif, Pasal 8 tentang persamaan di muka hukum, Pasal 23 tentang hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya, Pasal 32 tentang jaminan hak miliknya untuk tidak diambil sewenang-wenang.

Penegasan ini menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia diakui eksistensinya secara konstitusional. Dukungan konstitusi ini memperkuat pemahaman dan kesadaran untuk menghormati dan melindungi hak mereka. Selain itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga terdapat pengakuan atas hak ulayat masyarakat adat atau yang serupa dengan itu.

Setelah kemerdekaan dan pendirian negara Indonesia, pemerintah Indonesia memandang negara sebagai pengejawantahan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kepentingan publik atau masyarakat ditransformasikan menjadi kepentingan negara. Pasal 33 UUD 1945 disusun berdasarkan konsep ini.

Kepentingan rakyat Indonesia atas bumi, air, kekayaan alam, serta cabang-cabang produksi vital, ditransformasikan menjadi kepentingan negara sepanjang tujuannya untuk memakmurkan rakyat. Selanjutnya, ketentuan konstitusi atas hak menguasai negara ini diterapkan dalam seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia.<sup>7</sup>

Pengertian "penguasaan" dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Juga beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain. Ada penguasaan yuridis, yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain, misalnya seseorang yang memiliki tanah tidak mempergunakan tanahnya sendiri akan tetapi disewakan kepada pihak lain, dalam hal ini secara yuridis tanah tersebut dimiliki oleh pemilik tanah akan tetapi secara fisik dilakukan oleh penyewa tanah. Ada juga penguasaan secara yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik, misalnya kreditor (bank) pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan (jaminan), akan tetapi secara fisik penguasaannya tetap ada pada pemegang hak atas tanah. Penguasaan yuridis dan fisik atas tanah ini dipakai dalam aspek privat. Ada penguasaan yuridis yang beraspek publik, yaitu penguasaan atas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA.<sup>8</sup>

### **3.2 Sistem hukum agraria nasional menjamin kedudukan pranata hak atas tanah adat**

Di Indonesia, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat dimana sendi-sendi dari hukum tersebut berasal dari masyarakat hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional,

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Ramli Zein, 1995, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm 57.

dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia. Dengan demikian menurut B.F Sihombing, hukum tanah adat adalah hak pemilikan dan penguasaan sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat pada masa lampau dan masa kini serta ada yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan secara autentik atau tertulis, kemudian pula ada yang didasarkan atas pengakuan dan tidak tertulis.<sup>9</sup>

Bagi masyarakat hukum adat, maka tanah mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanah merupakan tempat di mana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal, dan tanah juga memberikan penghidupan baginya. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah, Ter Haar menyatakan sebagai berikut: *“Masyarakat tersebut mempunyai hak atas tanah itu dan menerapkannya baik ke luar maupun ke dalam. Atas dasar kekuatan berlakunya keluar, maka masyarakat sebagai suatu kesatuan mempunyai hak untuk menikmati tanah tersebut. Atas dasar kekuatan berlakunya ke dalam masyarakat mengatur bagaimana masing-masing anggota masyarakat melaksanakan haknya, sesuai dengan bagiannya, dengan cara membatasi peruntukan bagi tuntutan-tuntutan dan hak-hak pribadi serta menarik bagian tanah tertentu dari hak menikmatinyasecara pribadi, untuk kepentingan masyarakat.”*

Masyarakat hukum adat tersebut, sebenarnya dapat ditinjau sebagai suatu totalitas, kesatuan publik maupun badan hukum. Sebagai totalitas, maka masyarakat hokum adapt merupakan penjumlahan dari warga-warganya termasuk pula pemimpinnya atau kepala adatnya. Sebagai suatu kesatuan publik, maka masyarakat hukum adat sebenarnya merupakan suatu badan penguasa yang mempunyai hak untuk menertibkan masyarakat serta mengambil tindakan-tindakan tertentu terhadap warga masyarakat. Sebagai badan hukum, maka masyarakat hukum adat diwakili oleh kepala adatnya, dan lebih banyak bergerak di bidang hukum perdata. Dengan demikian, maka sebenarnya hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya, merupakan suatu hubungan publik maupun hubungan perdata, oleh masyarakat hukum adat menguasai dan memiliki

---

<sup>9</sup> L. Michael Hager, *The Rule of Law in Developing Countries*, dalam B. F Sihombing, *Ibid.*, hlm. 67.

tanah tersebut. Penguasaan dan pemilikan atas tanah oleh masyarakat hukum adat oleh Van Vollen Hoven disebut sebagai *beschikkingrecht*.

Masyarakat hukum adat sebagai suatu totalitas, memiliki tanah dan hak tersebut dinamakan hak ulayat yang oleh Hazairin disebut sebagai hak bersama. Oleh karena itu, maka masyarakat hukum adat menguasai dan memiliki tanah terbatas yang dinamakan lingkungan tanah (wilayah *beschikkingskring*). Lingkungan tanah tersebut lazimnya berisikan tanah kosong murni, tanah larangan dan lingkungan perusahaan yang terdiri dari tanah di atasnya terdapat pelbagai bentuk usaha sebagai perwujudan hak pribadi atau hak peserta atas tanah.

Apabila dipandang dari sudut bentuk masyarakat hukum adat, maka lingkungan tanah mungkin dikuasai dan dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu atau beberapa masyarakat hukum adat. Oleh karena itu biasanya dibedakan antara: (a) Lingkungan tanah sendiri, yaitu lingkungan tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh satu masyarakat hukum adat, misalnya, masyarakat hukum adat tunggal (desa di Jawa), atau masyarakat hukum adat atasan (Kuria di Angkola), atau masyarakat hukum adat bawahan (Huta di Penyabungan). (b) Lingkungan tanah bersama, yaitu suatu lingkungan tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh beberapa masyarakat hukum adat yang setingkat, dengan alternatif-alternatif, sebagai berikut: (1) Beberapa masyarakat hukum adat tunggal, misalnya beberapa belah di Gayo. (2) Beberapa masyarakat hukum adat atasan, misalnya luhat di Padanglawas. (3) Beberapa masyarakat hukum adat bawahan, misalnya huta-huta di Angkola.

Pada dasarnya hak ulayat keberadaannya dalam UUPA adalah sudah diakui, akan tetapi pengakuan tersebut masih diikuti oleh syarat-syarat tertentu, yaitu: “eksistensi” dan mengenai pelaksanaannya. Oleh karena itu, hak ulayat dapat diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada. Maksudnya adalah apabila di daerah-daerah dimana hak itu tidak ada lagi, maka tidak akan dihidupkan kembali. Pelaksanaan tentang hak ulayat dalam UUPA diatur di dalam pasal 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPA dapat dipahami juga bahwa hak ulayat diakui sebagai suatu hak atas tanah tersendiri, apabila memenuhi dua persyaratan, yaitu Hak tersebut ada (eksis) dan Pelaksanaan hak yang masih ada tersebut harus

sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Namun demikian tidak terdapat ketentuan dan penjelasan lebih lanjut tentang kriteria “ada” nya hak ulayat dan tentang batasan “kepentingan nasional dan negara”. Boedi Harsono menyebutkan bahwa alasan pembentuk UUPA tidak mengatur tentang hak ulayat karena pengaturan hak ulayat, baik dalam penentuan kriteria maupun pendaftarannya, akan melestarikan keberadaan hak ulayat, sedangkan secara alamiah terdapat kecendrungan melemahnya hak ulayat.<sup>10</sup> Berkenaan dengan batasan harus sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, Maria SW. Sumardjono menyatakan bahwa pemikiran yang melandasi penyusun UUPA saat itu lebih didorong oleh pengalaman empiris berupa hambatan ketika Pemerintah memerlukan tanah yang dipunyai masyarakat hukum adat untuk proyek pertanian di Sumatera Selatan menjelang tahun 1960, yang antara lain membuahkan pokok-pokok pikiran bahwa kepentingan masyarakat hukum adat harus tunduk kepada kepentingan nasional dan bahwa hak ulayat tidak bersifat eksklusif.<sup>11</sup>

Dalam banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, hukum adat atau adat istiadat yang memiliki sanksi, mulai mendapat tempat yang sepatutnya sebagai suatu produk hukum yang nyata dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, hukum adat sedemikian dapat memberikan kontribusi sampai taraf tertentu untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Hukum saat ini malahan dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh hakim, sehingga dapat terlihat bahwa hukum adat itu efisien, efektif, aplikatif dan *come into force* ketika dihadapkan dengan masyarakat modern dewasa ini. Sehingga dalam hukum agraria nasional hukum adat dijadikan juga sebagai landasannya.

Hukum agraria nasional tidak hanya tercantum dalam UUPA 1960 saja, tetapi juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur

---

<sup>10</sup> Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, jilid 1, Jakarta: Djambatan, hlm. 231.

<sup>11</sup> Maria SW. Sumardjono, 1990, *Telaah Konseptual terhadap Beberapa Aspek Hak Milik, pembahasan terhadap makalah Chadijah Dalimunthe “Konsep Akademis Hak Milik Atas Tanah menurut UUPA”*, disampaikan pada Seminar Nasional Hukum Agraria ke-3, kerja sama BPN-FH USU, Medan, 19-20 September, hlm. 4.

tentang perjanjian-perjanjian ataupun transaksi-transaksi yang berhubungan dengan tanah. Misalnya, Undang-undang no. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian, Undang-undang no. 2 tahun 1960 tentang Penetapan Ceiling Tanah dan Gadai tanah pertanian. Di sini dapat dilihat bahwa semua masalah hukum tanah adat secara praktis di akomodasi oleh peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah (penguasa). Pada dasarnya hak ulayat keberadaannya dalam UUPA adalah sudah diakui, akan tetapi pengakuan tersebut masih diikuti oleh syarat-syarat tertentu, yaitu: “eksistensi” dan mengenai pelaksanaannya. Oleh karena itu, hak ulayat dapat diakui sepanjang menurut kenyataan masih ada. Maksudnya adalah apabila di daerah-daerah dimana hak itu tidak ada lagi, maka tidak akan dihidupkan kembali. Dengan adanya pengakuan hak ulayat, maka pada dasarnya masyarakat kolektif secara adat akan diperhatikan sepanjang kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan, sebaliknya jika berdasarkan hak ulayat menjadi penghalang kemajuan pembangunan masyarakat dan sertifikasi tanah, sehingga harus diutamakan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

*Pertama*, Hak masyarakat adat dilindungi dalam Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan “*identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.*” Berdasarkan Pasal tersebut terlihat bahwa kesatuan masyarakat adat dengan hak tradisionalnya yang masih hidup diakui eksistensinya. Sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, maka TAP XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan perlindungan yang layak bagi eksistensi hak-hak masyarakat adat termasuk hak ulayatnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 tentang hak untuk mempertahankan kehidupan, Pasal 6 tentang hak untuk memperjuangkan hak-haknya secara kolektif, Pasal 8 tentang persamaan di muka hukum, Pasal 23 tentang hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya, Pasal 32 tentang jaminan hak miliknya untuk tidak diambil

sewenang-wenang. Penegasan ini menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia diakui eksistensinya secara konstitusional. Dukungan konstitusi ini memperkuat pemahaman dan kesadaran untuk menghormati dan melindungi hak mereka. Selain itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga terdapat pengakuan atas hak ulayat masyarakat adat atau yang serupa dengan itu.

*Kedua*, Pada dasarnya hak ulayat keberadaannya dalam UUPA adalah sudah diakui, akan tetapi pengakuan tersebut masih diikuti oleh syarat-syarat tertentu, yaitu: “eksistensi” dan mengenai pelaksanaannya. Pelaksanaan tentang hak ulayat dalam UUPA diatur di dalam pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut: *“Pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Sesuai dengan apa yang diterangkan dalam penjelasan umum (Angka H/3) disini ditegaskan pula bahwa kepentingan sesuatu masyarakat harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih tinggi dan lebih luas”*. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPA dapat dipahami juga bahwa hak ulayat diakui sebagai suatu hak atas tanah tersendiri, apabila memenuhi dua persyaratan, yaitu Hak tersebut ada (eksis) dan Pelaksanaan hak yang masih ada tersebut harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Namun demikian tidak terdapat ketentuan dan penjelasan lebih lanjut tentang kriteria “ada” nya hak ulayat dan tentang batasan “kepentingan nasional dan negara”.

#### **4.2 Saran**

*Pertama*, Saran yang dapat diberikan sebagai solusi atas permasalahan yang dibahas pada skripsi ini. pemerintah hendaknya memberlakukan hukum adat sejajar dengan hukum nasional.

*Kedua*, Pemerintah hendaknya menjadikan hukum adat sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional. Maka perlu dilakukan inventarisasi oleh pemerintah terkait hukum adat dan hak tradisional adat.

*Ketiga*, Melalui kewenangan otonomi daerahnya, diharapkan pemerintah daerah berperan aktif dalam pembuatan perda yang menjamin tentang perlindungan hak masyarakat adat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Yusuf, Muslim. (2016). *Kepastian Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dan Sumberdaya Alam*, Prosiding Seminar Nasional Volume 02, Nomor 1.
- Harsono, Boedi. (1999). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Pelaksanaanya*, Jakarta; Djembatan.
- Harsono, Boedi. (2003). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, jilid 1*, Jakarta: Djembatan.
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Suwitra, I Made. (2010). “Dampak Konversi dalam UUPA terhadap Status Tanah Adat”. *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No.1, Januari 2010.
- SW Sumardjono, Maria, 2007, *Kebijakan Pertanahan Anatar Regulasi Dan Implementasi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- SW. Sumardjono, Maria. (1990). Telaah Konseptual terhadap Beberapa Aspek Hak Milik, pembahasan terhadap makalah Chadijah Dalimunthe “Konsep Akademis Hak Milik Atas Tanah menurut UUPA”, disampaikan pada *Seminar Nasional Hukum Agraria ke-3, kerja sama BPN-FH USU, Medan, 19-20 September*.
- Warman, Kurnia. (2012). *Studi Tentang Kebijakan Penguatan Tenurial Masyarakat Dalam Penguasaan Hutan*, Bogor: Social Forestry Specialist, World Agroforestry Centre Southeast Asia Regional.
- Zein, Ramli. (1995). *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, Jakarta: Rineka Cipta.